

DAFTAR PUSTAKA

- Afrda, Nur. 2013. "Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)." *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Aprianto, Agus Dian. "Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Obyek Wisata Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul 2000-2004." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Fibrianti, Diana dan Ikhsan Budi Riharjo. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Desentralisasi, Komitmen Organisasi, dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 1 Nomor 1*.
- Efrida, Popi Fauziati dan Nurhuda. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi*. Universitas Bung Hatta
- Kaho, Josef Riwu K. 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Yogyakarta. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Machligar, Mukjizat Milang. 2016. "Berbagai Kemungkinan Fraud Dalam Perbankan Syariah Menurut Perpektif Stakeholders." *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Najahningrum, Anik Fatun. 2013. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY." *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.7 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Kinerja SKPD
- Pramudita, Aditya. 2013. "Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Fraud di Sektor Pemerintah". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang
- Website mengenai ilmu pemerintah: "<http://pemerintah.net/sistem-pengendalian-intern-pemerintah/>"
- The Liang Gie. 1989. *Pertumbuhan Daerah Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah